

PERAN KOMITE AUDIT DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE

R. Bernadius Christianto

Universitas Surabaya

Abstract: *The role of audit committee in the company is to create good corporate governance. This is due to the audit committee that could encourage corporate management to meet all the principles that are owned by good corporate governance, including: transparency, accountability, responsibility, and fairness. The audit committee has the ability to create efficiencies and effectiveness that enhance the performance of companies in an effort to increase the value to be submitted to stakeholders for the purpose of implementing good corporate governance. The audit committee can achieve good corporate governance, if they able to maintain their independency. This relates to the ability of the audit committee to work without pressure of any party so there is no conflict of interest to carry out their functions.*

Keywords: *Audit Committee, Good Corporate Governance*

Pada praktik bisnis yang terjadi, manajemen perusahaan seringkali melakukan berbagai kecurangan yang akhirnya tidak menguntungkan sisi pihak lain yang telah bersedia bekerja sama dengan perusahaan. Manajemen perusahaan cenderung memiliki perilaku yang mendatangkan keuntungan bagi manajemen perusahaan sendiri dan merugikan pihak yang lain. Hal ini mampu dilakukan manajemen perusahaan karena perilaku manajemen perusahaan dalam mengembangkan bisnis sulit untuk dipantau oleh pihak lain yang berada di luar perusahaan. Hal lain yang menyebabkan adalah manajemen perusahaan memiliki informasi lebih yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Informasi ini digunakan manajemen perusahaan melakukan berbagai kecurangan guna mendatangkan keuntungan bagi manajemen perusahaan itu sendiri.

Pada beberapa kondisi, manajemen perusahaan juga tidak mampu membawa seluruh kepentingan banyak pihak yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga pihak yang paling berperan bagi perusahaan adalah pihak yang lebih diperhatikan oleh manajemen perusahaan dengan mengorbankan kepentingan dari pihak yang lain. Contoh kondisi tersebut adalah perilaku curang dari manajer perusahaan yang cenderung untuk menekan gaji buruh yang bekerja di perusahaan agar dapat menghasilkan

laba yang tinggi dan menguntungkan investor serta membuat investor tidak menarik dana yang diinvestasikan. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan perusahaan sendiri dan mendatangkan permasalahan ekonomi secara luas.

Manajemen perusahaan yang terus berlaku curang untuk mendatangkan keuntungan, membuat banyak pihak tidak percaya pada perusahaan tersebut. Ketidakpercayaan banyak pihak terhadap perusahaan tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab lambat laun akan menghambat perkembangan bisnis dan ekonomi secara makro. Bila perusahaan tidak mendapat dukungan dari banyak pihak, maka akan banyak perusahaan yang tutup, sehingga banyak pengangguran, daya beli yang merosot dan ekonomi mengalami kemunduran. Untuk mengembalikan kepercayaan tersebut perlu dikembangkan adanya penciptaan *good corporate governance* di perusahaan, sebagai upaya untuk mengelola usaha yang sehat. Priantara (2002) menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah upaya untuk mengelola perusahaan dengan transparan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga ada upaya untuk mengelola usaha dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan.

Penciptaan *good corporate governance* pada praktik yang ada membutuhkan adanya peran dari komite audit. *Good corporate governance* tidak akan berhasil diciptakan dan hanya menjadi konsep tertulis saja tanpa adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap pengelolaan usaha. Indriani dan Nurkholis (2002) menyatakan *good corporate governance* merupakan unsur penting dalam menciptakan *good corporate governance*. Komite audit akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengelolaan usaha yang sehat melalui peran pengawasan yang dilakukan. Komite audit merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan tugas yang dimiliki sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen perusahaan. Komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris, dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha. Adanya fungsi dari komite audit tersebut membuat ada dorongan untuk berusaha memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang terdiri dari: *fairness*, *responsibility*, *accountability*, dan *transparency*.

Peran penting komite audit untuk menciptakan *good corporate governance*, membuat adanya tuntutan untuk mempertahankan independensi komite audit dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit harus independen yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan peran pengawasan. Hal ini dibutuhkan agar temuan dalam tindak pengawasan yang dilakukan oleh komite audit mampu bersifat obyektif dalam arti sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga terus mendapatkan upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar selalu mampu menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya berlaku. Komite audit yang independen akan berlaku adil kepada setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. karena tidak membawa kepentingan dari pihak manapun tetapi berlaku adil kepada seluruh pihak berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Peran penting komite audit dalam *good corporate governance* tersebut mendatangkan tuntutan untuk memasukkan komite audit sebagai bagian dari pengembangan usaha.

PEMBAHASAN

Syakhroza (2003) menyatakan *good corporate governance* adalah suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulasi. *Good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur bagaimana suatu organisasi korporasi dikendalikan, diarahkan, dan diminta pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Konsep *good corporate governance* semakin berkembang dalam upaya memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang berubah dan semakin dinamis serta adanya perkembangan kepentingan *stakeholders* atas perusahaan.

Indriani dan Nurkholis (2002) menyatakan ada beberapa prinsip dasar berkaitan dengan *good corporate governance* yang harus diperhatikan, yaitu: *responsibility*, *accountability*, dan *transparency*.

- *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)
Kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Tidak ada pihak tertentu yang lebih diperhatikan dalam operasi kegiatan usaha karena semua memiliki hak yang sama dan arus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- *Responsibility* (pertanggungjawaban)
Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan usaha hendaknya tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang berlaku.
- *Accountability* (akuntabilitas)
Akuntabilitas merupakan kejelasan dari fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Bila akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik maka perusahaan akan terhindar dari benturan kepentingan peran pihak-pihak yang ada di perusahaan.
- *Transparency* (keterbukaan informasi)
Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan

informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Daniri (2005) menyatakan bahwa tahapan untuk menciptakan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

- Tahap persiapan, yaitu tahap yang terdiri dari tiga langkah utama meliputi:
 - *Awareness building* merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *good corporate governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya.
 - *Good corporate governance assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan *good corporate governance* saat ini.
 - *Good corporate manual building* merupakan penyusunan terhadap pedoman pelaksanaan *good corporate governance* secara manual.
- Tahap implementasi yaitu tahap yang terdiri dari tiga langkah utama meliputi:
 - Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek terkait dengan implementasi *good corporate governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *good corporate governance*.
 - Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *good corporate governance* yang ada. Pendekatan yang dilakukan dalam implementasi adalah *top down* atau dari atas ke bawah.
 - Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *good corporate governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi.
- Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauhmana efektivitas penerapan *good corporate governance* yang telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi atas praktik *good corporate governance* yang ada.

Komite Audit: Definisi, Tugas, Fungsi, dan Hal Terkait Lainnya

Keberadaan komite audit saat ini mulai diperhatikan dalam pengelolaan perusahaan yang sehat. Toha (2004) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat guna melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.

Suaryana (2005) menyatakan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, komite audit hendaknya melakukan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Komite audit juga bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih pendapat antara manajemen dan auditor mengenai interpretasi dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mencapai keseimbangan akhir, sehingga laporan lebih akurat.

Effendy (2007) menyatakan bahwa salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani pemegang saham (*share holder*) dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian dalam perusahaan. Pada saat ini komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak, belum terjalin dengan erat dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi komite audit dengan pihak yang berkepentingan yang berjalan dengan lancar, akan menghasilkan kinerja perusahaan meningkat, terutama dari aspek pengendalian.

Komite audit dalam perusahaan berkaitan dengan pihak-pihak lain berkenaan dengan operasional perusahaan. Kondisi yang ada menyebabkan komunikasi dengan berbagai pihak perlu dilakukan oleh komite audit. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dibutuhkan oleh anggota komite audit dalam menjalankan tugas yang dimiliki. Effendy (2007) menyatakan komite audit perlu menjalin komunikasi dengan:

- Dewan komisaris
Salah satu fungsi pokok komite audit adalah membantu tugas komisaris dalam aspek pengendalian perusahaan. Dalam rapat internal yang diselenggarakan secara rutin, komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Selain itu apabila ditugaskan secara khusus oleh komisaris, maka komite audit akan membuat laporan khusus yang ditujukan kepada komisaris.
- Manajemen
Komunikasi antara komite audit dengan manajemen memegang peranan yang cukup penting dalam rangka meningkatkan pengendalian perusahaan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh komite audit memerlukan interaksi secara signifikan dengan manajemen secara efektif, namun kehadiran manajemen tidak diharuskan dalam tiap rapat. Praktek yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari manajemen dalam rapat komite. Laporan atas beberapa aktivitas manajemen yang krusial terhadap komite merupakan salah satu tanggungjawabnya.
- Auditor internal
Komunikasi auditor internal dengan komite audit antara lain meliputi hal-hal tentang pertanggungjawaban atas struktur kendali internal dan laporan keuangan bebas kesalahan material, seleksi kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dampak penyesuaian hasil audit, pertanggungjawaban data non keuangan yang disepakati bersama, ketidaksepakatan manajemen dan auditor internal, diskusi pilihan auditor eksternal, dan masalah proses akuntansi, keterlambatan laporan tak masuk akal dan batas waktu laporan tak masuk akal.
- Auditor eksternal
Salah satu tanggung jawab komite audit adalah menilai hasil laporan audit dari auditor eksternal. Kedudukan komite audit yang merupakan perpanjangan tangan dari dewan komisaris dengan kompetensi yang dimiliki, diharapkan

dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal dapat berbentuk lisan atau tertulis. Masalah yang dapat dikomunikasikan antara lain adalah: tanggung jawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, kebijakan akuntansi signifikan, pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi, penyesuaian audit signifikan, informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan audit, ketidaksepakatan dengan manajemen, konsultasi dengan akuntan lain, isu besar yang dibicarakan dengan manajemen sebelum keputusan mempertahankan auditor, dan kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan keanggotaan komite audit menurut Indriani dan Nurkholis (2002). Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut ini:

- Independensi
Komite audit harus independen atau tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manajemen perusahaan dan pihak lainnya dalam menjalankan tugas yang dimiliki untuk mewujudkan kredibilitas di mata publik dan pemegang saham.
- Kompetensi
Kompetensi berkaitan dengan pemahaman yang memadai untuk dimiliki oleh anggota komite audit termasuk atribut-atribut yang mendukung pelaksanaan tugas dari komite audit tersebut, yang meliputi: sifat tidak mudah percaya, memiliki rasa ingin tahu, dapat berpikir logis, dan memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah.
- Komitmen
Komitmen meliputi kesadaran terhadap tanggung jawab yang dimiliki dan berlaku profesionalisme dalam menjalankan tugas yang dimiliki
- Kompensasi
Anggota komite audit harus didukung dengan paket kompensasi yang memadai untuk menjaga independensi, obyektivitas, dan mutu pekerjaan yang dimiliki.

Masalah Keagenan sebagai Pendorong Good Corporate Governance

Perusahaan banyak melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan sumber daya tambahan dalam rangka mengembangkan

kegiatan usaha yang dimiliki. Perusahaan mendapatkan tambahan modal keuangan dari investor dan kreditor, sumber daya berupa tenaga kerja dari masyarakat dan legalitas dari pemerintah. Kerja sama yang dilakukan perusahaan dengan berbagai pihak mendatangkan adanya hubungan keagenan, yaitu hubungan yang dibentuk di mana ada satu pihak yang berposisi sebagai agen dan ada satu pihak lain yang berposisi sebagai prinsipal. Agen merupakan pihak yang diberi kepercayaan serta harus bertanggung jawab kepada prinsipal sebagai pihak yang memberikan tanggung jawab. Manajemen perusahaan adalah pihak agen sedangkan pihak-pihak lain seperti: investor, kreditor, masyarakat dan pemerintah adalah bagian dai prinsipal.

Investor dan kreditor memberikan dana yang dimiliki untuk kemudian dipertanggungjawabkan oleh manajemen perusahaan berupa adanya pembagian keuntungan berupa dividen kepada investor dan bunga serta pokok pinjaman kepada kreditor. Masyarakat sebagai tenaga kerja memberikan tenaga yang dimiliki untuk mendapatkan gaji dan bonus yang menjadi haknya, sedangkan pemerintah memberikan kepercayaan manajemen perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasi usaha dan menuntut pertanggungjawaban adanya pembayaran pajak serta jaminan pemeliharaan lingkungan. Pada praktik tentang hubungan keagenan tersebut, seringkali terjadi masalah di mana manajemen perusahaan tidak mampu mempertanggungjawabkan dengan baik kepercayaan yang diberikan. Manajer perusahaan sering menyajikan pertanggungjawaban yang seakan-akan baik sehingga menguntungkan manajer perusahaan sendiri atau lebih memperhatikan pihak yang dirasa lebih berperan dalam upaya pengembangan perusahaan dengan mengesampingkan kepentingan dari pihak yang lain. Masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan dikenal dengan istilah masalah keagenan (*agency problem*).

Sulistyanto dan Warastuti (2004) menyatakan *agency problem* adalah permasalahan yang muncul karena manajer perusahaan sebagai pihak agen memiliki perilaku yang cenderung memihak *stakeholders* tertentu sebagai prinsipal yang mampu memberikan keuntungan terbesar bagi mereka. Investor sebagai pihak yang seringkali diutamakan oleh manajer perusahaan sebab pihak investor adalah penyaji dana untuk modal kegiatan bisnis. Agar investor tetap bertahan menanamkan saham pada perusahaan yang bersangkutan maka manajer

perusahaan berusaha menjalankan kegiatan operasi usaha yang mampu menghasilkan laba tinggi untuk memberikan dividen tinggi sebagai balas jasa kepada investor meskipun harus melanggar kepentingan pihak lain misalnya masyarakat luas yang terkait dengan perusahaan dengan mengesampingkan tanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan. Di samping itu, manajer perusahaan sebagai agen juga cenderung bertindak tidak jujur dengan melakukan berbagai kecurangan untuk menunjukkan adanya prestasi yang baik saat melakukan pertanggungjawaban kepada prinsipal agar mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut misalnya berkaitan dengan bonus yang diterima.

Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena lambat laun akan mengurangi kepercayaan dari pihak *stakeholders* perusahaan yang dirugikan. Bila makin banyak *stakeholders* yang dirugikan maka reputasi perusahaan dalam dunia bisnis menjadi tidak baik dan makin banyak pihak yang enggan melakukan kerja sama dengan perusahaan. Keagenan tersebut pada akhirnya membuat perusahaan tidak memiliki dukungan dalam berbisnis sehingga harus menghentikan kegiatan operasi usaha. Bila makin banyak perusahaan yang menghentikan kegiatan operasi usaha maka akan berdampak pada perekonomian negara, di mana jumlah pengangguran makin banyak, daya beli makin merosot, dan sebagainya. Upaya untuk melakukan tindakan yang mampu melindungi seluruh kepentingan *stakeholders* sangat diperlukan dalam hal ini, di mana *good corporate governance* merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan.

Keberadaan dari komite audit hendaknya dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka penerapan *good corporate governance*, karena komite audit mampu memberikan peran yang besar dalam penerapan *good corporate governance*. Komite audit pada dasarnya mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan berkaitan dengan upaya-upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kemampuan komite audit untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, membuat cita-cita untuk menciptakan *good corporate governance* bukan hanya cita-cita yang tertulis saja tetapi sungguh-sungguh dapat diwujudkan.

Peran komite audit untuk menciptakan *good corporate governance* melalui pemenuhan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dipahami dari pembahasan yang dipaparkan sebagai berikut ini:

Peran komite audit memenuhi prinsip *fairness* (kesetaraan)

Manajemen perusahaan dalam kegiatan operasional yang dilakukan membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Dalam rangka menjalin kerja sama yang baik, manajemen perusahaan hendaknya berlaku adil terhadap seluruh pihak yang ada, di mana tidak ada pihak yang lebih dipentingkan atau semua dianggap sama, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemampuan untuk berlaku *fair* kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama membuat manajemen perusahaan terhindar dari tuntutan pihak tertentu yang dirugikan.

Pada praktik yang terjadi, umumnya manajemen perusahaan mementingkan pihak tertentu akibat ketergantungan yang besar terhadap pihak tersebut. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan harus mengorbankan kepentingan dari pihak yang lain. Suatu contoh adalah perhatian yang lebih besar kepada investor sebagai pemegang saham membuat manajemen perusahaan berusaha untuk memberikan keuntungan yang besar dengan melakukan manipulasi pajak, sehingga pemerintah menjadi pihak yang dirugikan dan suatu saat akan menuntut perusahaan bila dapat dibuktikan. Hal tersebut bukan merupakan pengelolaan usaha yang sehat atau menyalahi aturan *fairness* sebagai upaya untuk menciptakan *good corporate governance*.

Komite audit memiliki kemampuan untuk memenuhi prinsip kewajaran di mana komite audit memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan kepada manajemen perusahaan dalam rangka memberikan perlakuan yang wajar atau setara kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Kondisi yang ada mendatangkan kemampuan untuk memperlakukan seluruh pihak *stakeholders* secara adil.

Peran komite audit memenuhi prinsip *responsibility* (pertanggungjawaban)

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dibatasi oleh adanya aturan atau undang-undang yang harus ditaati. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan juga melakukan bisnis yang sehat, bukan untuk kepentingan perusahaan sendiri tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dalam bisnis. Kondisi yang ada membuat adanya prinsip *responsibility* merupakan bagian dari prinsip *good corporate governance*, sebab dalam prinsip *responsibility* diupayakan perusahaan tidak melakukan

pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku atau mampu memenuhi tanggung jawab sosial yang seharusnya dimiliki.

Keberadaan komite audit di perusahaan diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut, sebab dengan adanya komite audit ada pengawasan bagi operasional bisnis perusahaan yang dilakukan oleh anggota manajemen dengan tujuan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku, sehingga perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap pihak-pihak lain, sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan komite audit mampu menciptakan *good corporate governance* dengan upaya memenuhi prinsip pertanggungjawaban.

Peran komite audit memenuhi prinsip *accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi untuk menciptakan *good corporate governance*, di mana ada rincian terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dalam rangka mengembangkan bisnis perusahaan. Komite audit memiliki peran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam usaha melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko dan keberlangsungan fungsi pengawasan di perusahaan.

Komite audit memiliki kekuatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari auditor internal perusahaan. Hal tersebut membuat komite audit memiliki kesempatan untuk melakukan peninjauan terhadap struktur organisasi dan deskripsi kerja masing-masing bagian di perusahaan, beserta dengan sistem pengendalian internal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan guna melihat apakah ada kemampuan untuk mengelola risiko terutama yang berkaitan dengan peluang yang akan dimanfaatkan oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka melakukan kecurangan untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak itu sendiri.

Manfaat lain dari peran komite audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan auditor internal adalah kemampuan meninjau anggota manajemen perusahaan yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan yang mendatangkan kerugian bagi perusahaan, sehingga dengan demikian upaya untuk menciptakan kejelasan akuntabilitas di perusahaan semakin jelas dengan keberadaan komite audit.

Peran komite audit memenuhi prinsip *transparency* (keterbukaan informasi)

Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit merupakan pengawasan menyeluruh tentang hal-hal yang dilakukan oleh dewan direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Pengawasan menyeluruh tersebut bukan hanya pengawasan dalam bidang laporan keuangan saja, tetapi juga perilaku-perilaku yang ada saat menjalankan operasional perusahaan. Tugas komite audit tersebut pada akhirnya akan mendatangkan dorongan bagi direksi untuk lebih terbuka terhadap informasi yang dimiliki terutama untuk menyeimbangkan informasi yang akhirnya tidak ada indikasi bagi direksi perusahaan untuk menggunakan informasi lebih yang dimiliki untuk tindak kecurangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit akan membuat ada banyak informasi yang dilaporkan atau diungkapkan, sehingga sesuai dengan informasi tersebut tidak ada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*) yang dirugikan. Pengelolaan secara sehat untuk meningkatkan nilai yang dimiliki dari *stakeholders* atau penciptaan *good corporate governance* akan dapat dipenuhi oleh adanya fungsi dari komite audit tersebut. Keberadaan komite audit di perusahaan diharapkan akan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan proses penelaahan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap upaya penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut diharapkan juga membuat manajemen perusahaan untuk terbuka dalam penyajian laporan keuangan bahkan informasi-informasi lain yang dipandang penting yang disajikan bersama dengan laporan keuangan.

Peranan komite audit berkaitan dengan *good corporate governance* dapat juga disebabkan oleh kemampuan dari komite audit untuk mengelola risiko. Ali (2006) menyatakan bahwa perusahaan memiliki risiko dalam menjalankan kegiatan operasional yang dimiliki. Risiko tersebut hendaknya dapat diminalisasi atau dikelola dengan baik oleh manajemen perusahaan termasuk di dalamnya berbagai risiko yang menyebabkan adanya berbagai kecurangan sehingga menghambat adanya *good corporate governance*. Komite audit akan menjalankan fungsi berkaitan dengan tata kelola dunia usaha yang sehat, sebagai indikator *good corporate governance* melalui kemampuan dari komite audit dalam rangka menjalankan peran sebagai supervisi atau pengawas. Berdasarkan paparan dari Ali (2006) tersebut maka komite audit memiliki fungsi

penting dengan tindakan pengawasan operasional perusahaan yang dilakukan untuk menghindari atau mengelola risiko usaha yang timbul dengan memberikan dorongan melakukan pengelolaan usaha yang sehat sebagai bentuk dari *good corporate governance*.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini:

- *Good corporate governance* muncul sebagai akibat dari masalah keagenan yang timbul, di mana ada perilaku untuk mendatangkan keuntungan pribadi khususnya dari agen dengan merugikan kepentingan dari pihak lain (prinsipal). Adanya *good corporate governance* diharapkan mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan. Pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut diperlakukan dengan sama. Hal ini memenuhi tujuan untuk memberikan pemahaman tentang adanya masalah keagenan sebagai pendorong *good corporate governance*.
- Untuk menciptakan *good corporate governance* dibutuhkan peran dari komite audit. Aplikasi tugas dari komite audit yang dilakukan sesuai dengan sistem yang ada akan membuat prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu *fairness*, *responsibility*, *accountability*, dan *transparency* dapat dipenuhi. Kondisi yang ada menyebabkan *good corporate governance* bukan hanya tujuan tertulis saja tetapi juga mampu diwujudkan dengan adanya fungsi komite audit di perusahaan. Hal ini memenuhi tujuan untuk mampu memberikan pemahaman tentang peran komite audit dalam penciptaan *good corporate governance*.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, H.M. 2006. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daniri, M.A. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Effendy, M. 2007. Komunikasi Komite Audit: Antara Harapan dan Kenyataan, *Media Akuntansi*, Juli-Agustus: 65-68.

- Indriani, dan Nurkholis. 2002. Manfaat dan Fungsi Komite Audit dalam Mewujudkan Tata Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance): Persepsi Manajemen Perusahaan Go Public, *Tema*, Volume III, Nomor 1, Maret: 37–58.
- Priantara, D. 2002. Peran Akuntan Perusahaan pada *Good Corporate Governance*, *Jurnal Akuntansi*, Th VI/01/Mei: 86–102.
- Suaryana, A. 2005. Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba, *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, Solo, September: 147–158.
- Sulistiyanto, H.S., dan Y. Warastuti. 2004. Good Corporate Governance: Harapan dan Tantangan, *Jurnal Studi Bisnis*, Vol2, No 1, Hal 53–60.
- Syakhroza, A. 2003. Teori Corporate Governance, *Usahawan*, No 8, Th XXXII, Agustus: 19–25.
- Toha, A. 2004. Efektivitas Peranan Komite Audit dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 8 No. 3, September: 17–41.